

Demokrasi Digital dan Polarisasi Politik: Strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Civic Unity

Digital Democracy and Political Polarization: Citizenship Education Strategy in Building Civic Unity

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Rafida Putri Parastuti

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: rafidaofc@gmail.com

Naqiyyatul Aghni Nur Sya'ban

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: naqiacilacap@gmail.com

Zahrifah Rahmah

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: zahrifahrahmah@gmail.com

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 25 October 2025
Published : 27 October 2025

Keywords: Civics Education, Political Polarization, Civic Unity, Digital Democracy, Tolerance.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Polarisasi Politik, Civic Unity, Demokrasi Digital, Toleransi.

Abstract

Civics Education (PKn) plays a crucial role in shaping citizens' political and social awareness, particularly amidst the challenges of increasingly sharp political polarization. This polarization often exacerbates social fragmentation and threatens societal integration in digital democracy. As the development of digital technology expands the public space for political discussion, it is crucial to explore how PKn can serve as an instrument for strengthening civic unity. This study aims to analyze the challenges faced by civics education in building unity amidst political polarization and to formulate strategies that can be implemented in the context of digital democracy. The results indicate that integrating technology-based approaches, developing critical thinking skills, and instilling the values of tolerance and constructive dialogue are effective strategies for strengthening civic unity. In conclusion, civics education that adapts to digital developments can be a solution to address the negative impacts of political polarization.

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik dan sosial warga negara, terutama di tengah tantangan polarisasi politik yang

semakin tajam. Polarisasi ini seringkali memperburuk fragmentasi sosial dan mengancam integrasi masyarakat dalam demokrasi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang memperluas ruang publik untuk diskusi politik, penting untuk mengeksplorasi bagaimana PKn dapat menjadi instrumen untuk memperkuat civic unity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan untuk membangun persatuan di tengah polarisasi politik serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam konteks demokrasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan berbasis teknologi, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta penanaman nilai-nilai toleransi dan dialog konstruktif adalah strategi yang efektif untuk memperkuat civic unity. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan yang adaptif terhadap perkembangan digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak negatif polarisasi politik.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Rafida Putri Parastuti, Naqiyyatul Aghni Nur Sya'ban, Zahrifah Rahmah. "Demokrasi Digital dan Polarisasi Politik: Strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Civic Unity", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 687-696. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Rafida Putri Parastuti, Naqiyyatul Aghni Nur Sya'ban, Zahrifah Rahmah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Demokratis, baik polarisasi politik telah menjadi fenomena yang semakin mencolok di banyak negara di dunia nyata maupun dalam ruang digital. Perbedaan pandangan politik yang tajam antara kelompok-kelompok sosial dapat memecah kohesi sosial dan memperburuk konflik antarwarga negara (Sunstein, 2009). Dalam konteks ini, civic unity—sebuah konsep yang menekankan persatuan sosial dan integrasi politik—menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan hidup demokrasi. Era digital, dengan munculnya platform media sosial, memperburuk polarisasi politik melalui penyebaran informasi yang cepat dan, sering kali, tidak terverifikasi, yang memperkuat pandangan ekstrem dan menciptakan ruang bagi radikalisasi (Pariser, 2011).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik dan sosial yang inklusif. Namun, di tengah polarisasi yang semakin dalam, tantangan utama bagi PKn adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga koheren dalam kerangka kebersamaan politik. Di sinilah, pendekatan baru dalam pendidikan kewarganegaraan yang menyesuaikan diri dengan tantangan demokrasi digital sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pendidikan kewarganegaraan yang efektif dalam mengurangi polarisasi politik dan membangun civic unity di era demokrasi digital.

Meskipun banyak penelitian yang menyoroti pentingnya civic unity dan pendidikan politik, sedikit yang fokus pada tantangan polarisasi dalam konteks digital yang berkembang pesat (Boulianne, 2015). Media sosial dan platform digital lainnya telah menciptakan "ruang publik" yang memungkinkan

informasi—baik yang benar maupun yang salah—beredar tanpa batasan. Polarisasi yang semakin tajam di ruang digital ini mengancam stabilitas demokrasi, dan dengan demikian, perlu adanya penyesuaian dalam cara pendidikan kewarganegaraan diterapkan. Pemahaman tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat beradaptasi dengan perubahan ini sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan memitigasi dampak negatif polarisasi politik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pemahaman tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran penting dalam membangun civic unity di tengah tantangan polarisasi politik. Kontribusi ini dapat membantu pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara pendidikan politik, polarisasi, dan demokrasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan dan Tantangan Polarisasi Politik: Strategi Membangun Civic Unity di Era Demokrasi Digital dirancang secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivis, karena fokus kajian terletak pada pemaknaan, pengalaman, serta strategi yang digunakan oleh berbagai aktor dalam menghadapi polarisasi politik. Pendekatan ini relevan untuk menggali dimensi normatif, praktis, dan kritis dalam pendidikan kewarganegaraan di tengah perkembangan demokrasi digital yang sarat dengan dinamika opini publik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Kasus yang ditelaah mencakup praktik pendidikan kewarganegaraan, baik di ranah formal (sekolah dan perguruan tinggi) maupun non-formal (komunitas, organisasi masyarakat sipil, serta ruang digital). Melalui studi kasus, peneliti dapat menelaah secara mendalam strategi membangun civic unity di tengah tantangan disrupsi digital dan polarisasi politik.

Populasi penelitian mencakup pendidik, mahasiswa/pelajar, aktivis komunitas, dan praktisi media digital. Dari populasi tersebut dipilih sampel purposif, yaitu individu dan kelompok yang dianggap memiliki relevansi tinggi dengan persoalan yang diteliti, misalnya guru PPKn, mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaan, serta pengelola forum diskusi daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Wawancara memungkinkan eksplorasi pandangan dan strategi aktor, observasi digunakan untuk memahami praktik langsung dalam ruang belajar dan interaksi digital, sementara dokumentasi (artikel, kurikulum, postingan media sosial) memberikan data pendukung.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai instrumen kunci dalam merancang pedoman wawancara, catatan lapangan, dan rubrik observasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil temuan lebih reliabel.

Analisis data dilakukan secara analisis tematik melalui tahap reduksi data, kategorisasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diorganisasi untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, polarisasi politik, dan strategi membangun civic unity. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam sekaligus rekomendasi strategis bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di era demokrasi digital.

3. PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran signifikan dalam mengatasi polarisasi politik di era demokrasi digital. Temuan utama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi digital kewargaan. Dari wawancara dengan 20 mahasiswa, 70% mengaku sering terpapar disinformasi politik melalui media sosial, sementara hanya 35% yang mampu melakukan verifikasi informasi secara konsisten.
2. Kesenjangan antara kurikulum dan praktik digital. Observasi di dua sekolah menengah memperlihatkan bahwa materi PKn masih dominan normatif (misalnya, penguasaan konsep demokrasi dan konstitusi), namun minim membekali siswa dengan keterampilan deliberasi digital.
3. Munculnya inisiatif civic digital. Studi kasus pada satu komunitas pemuda menunjukkan adanya forum diskusi daring lintas kelompok yang mendorong dialog sehat. Peserta forum melaporkan penurunan stereotip negatif antarpendingung politik setelah tiga bulan mengikuti program diskusi terstruktur.
4. Strategi kolaboratif pendidik dan komunitas. Guru PKn yang berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil berhasil mengintegrasikan pelatihan critical thinking dan literasi digital ke dalam pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi publik berbasis data.

3.1. Teori Polarisasi Politik

Polarisasi politik adalah proses di mana perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat semakin tajam, menghasilkan kesenjangan sosial dan politik yang lebih besar (Iyengar, Sood, & Lelkes, 2012). Dalam konteks ini, politik menjadi semakin tersegmentasi dan ekstrem, di mana individu dan kelompok lebih cenderung berfokus pada perbedaan daripada kesamaan. Polarisasi politik sering kali diperburuk oleh "echo chambers" dan "filter bubbles", di mana individu hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri (Sunstein, 2009). Fenomena ini lebih

intensif di era digital, di mana platform media sosial memberikan ruang bagi perbedaan pendapat untuk berkembang dengan cepat dan radikal.

Teori "Group Polarization" yang dikembangkan oleh Moscovici dan Zavalloni (1969) mengemukakan bahwa interaksi dalam kelompok dapat memperburuk pandangan ekstrem, sebuah proses yang juga terlihat jelas dalam interaksi politik di ruang digital. Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang sudah memiliki pandangan politik yang serupa semakin memperkuat posisi mereka setelah berdiskusi di media sosial, menghasilkan pandangan yang lebih radikal dibandingkan sebelum diskusi tersebut.

3.2. Demokrasi Digital dan Dampaknya terhadap Polarisasi

Era digital, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan media sosial dan platform online lainnya, telah menciptakan tantangan baru dalam demokrasi. Media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat, namun sering kali tanpa kontrol yang memadai (Pariser, 2011). Hal ini memperburuk polarisasi dengan cara menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan mendalamnya filter bubble, di mana individu hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Menurut Boulianne (2015), penggunaan media sosial dapat memperburuk ketimpangan partisipasi politik dan memperkuat polarisasi, karena pengguna lebih cenderung mengikuti akun atau halaman yang sesuai dengan preferensi politik mereka, sehingga mengurangi interaksi antar kelompok dengan pandangan berbeda.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kehadiran teknologi digital berfungsi sebagai "double-edged sword" dalam konteks demokrasi. Di satu sisi, teknologi dapat memperkuat demokrasi dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas, tetapi di sisi lain, ia dapat memperburuk polarisasi politik (Tufekci, 2015). Vaccari (2015) menemukan bahwa meskipun teknologi digital dapat memperluas partisipasi politik, ia juga mendorong konsolidasi pandangan ekstrem, yang memperburuk fragmentasi sosial.

3.3. Pendidikan Kewarganegaraan dan Peranannya dalam Mengatasi Polarisasi

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun civic unity, yaitu kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam sebuah masyarakat demokratis. PKn berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan toleransi (Grasso & Richetti, 2019). Dalam konteks polarisasi politik, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memperkuat kerangka sosial yang koheren dan mengurangi ketegangan yang dihasilkan dari perbedaan politik.

Dewey (1916) dalam teorinya tentang pendidikan demokratis menyatakan bahwa pendidikan harus memfasilitasi diskusi terbuka dan pengembangan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan warga negara untuk mengatasi perbedaan. Di sisi lain, Nussbaum (2010) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mengajarkan hak

dan kewajiban, tetapi juga empati, yang dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.

Namun, meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar dalam memerangi polarisasi, tantangan besar muncul dalam implementasinya. Macedo (2000) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sering kali lebih berfokus pada aspek teori dan kurang dalam pengembangan keterampilan sosial yang relevan dengan kehidupan politik nyata. Di era digital, tantangan ini semakin berat, karena siswa dan warga negara terpapar informasi yang sangat bias dan fragmentaris.

3.4. Strategi Membangun Civic Unity di Era Demokrasi Digital

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa membangun civic unity di era digital membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Hargittai (2015) mengusulkan integrasi literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi dampak buruk dari informasi yang bias dan polarisasi yang terjadi di ruang digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan warga negara untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak terjebak dalam filter bubble yang memperburuk polarisasi.

Lebih lanjut, Klein (2017) menyoroti pentingnya menciptakan ruang bagi diskusi politik yang konstruktif di media sosial, dengan mengedepankan dialog yang inklusif dan terbuka. Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang melibatkan warga negara dalam kegiatan sosial yang nyata dapat memperkuat rasa persatuan dan mengurangi ketegangan politik (Boulianne, 2015). Pendidikan yang melibatkan media sosial dalam konteks yang positif juga dapat menciptakan forum yang aman dan produktif untuk diskusi.

Namun, Van Dijk (2013) mengingatkan bahwa media sosial dapat memperburuk ketimpangan dalam akses informasi, yang berdampak pada kesenjangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis untuk membangun jembatan antara kelompok yang terpolarisasi.

3.5. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang polarisasi politik, demokrasi digital, dan pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik, ia juga dapat memperburuk perpecahan sosial dan politik (Pariser, 2011; Tufekci, 2015). Penelitian-penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya fokus pada teori demokrasi, tetapi juga pada keterampilan praktis yang memungkinkan warga negara untuk berinteraksi secara produktif, baik di dunia nyata maupun di dunia digital (Grasso & Richetti, 2019; Hargittai, 2015).

Namun, satu kekurangan yang ditemukan dalam literatur ini adalah kurangnya perhatian terhadap pendekatan transformatif dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan keterampilan digital dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks demokrasi digital (Boulianne, 2015). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa strategi yang lebih berbasis teknologi diperlukan untuk mengatasi polarisasi politik secara efektif, namun masih ada tantangan besar dalam implementasinya, terutama dalam memastikan keterlibatan seluruh segmen masyarakat (Klein, 2017; Van Dijk, 2013).

Temuan di atas sejalan dengan teori civic competence yang dikemukakan oleh Hoskins & Mascherini (2009), yang menekankan keterampilan berpikir kritis, partisipasi, dan nilai kebersamaan sebagai inti kewarganegaraan demokratis. Rendahnya literasi digital mahasiswa memperkuat temuan UNESCO (2021) bahwa generasi muda rentan terhadap disinformasi politik yang memperparah polarisasi.

Kesenjangan kurikulum PKN dengan praktik digital mengonfirmasi kritik Winataputra (2018) bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih berorientasi pada transfer pengetahuan, belum sepenuhnya transformatif. Namun, munculnya inisiatif civic digital dari komunitas menunjukkan adanya potensi pembelajaran partisipatif yang mendukung konsep public sphere Habermas, di mana ruang diskusi rasional dapat memediasi perbedaan pandangan politik.

Strategi kolaboratif guru dan komunitas sejalan dengan penelitian Norris & Inglehart (2019) yang menekankan pentingnya civic culture untuk melawan polarisasi. Dengan mengintegrasikan keterampilan literasi digital ke dalam PKN, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga praksis dalam membangun civic unity di era demokrasi digital.

Secara kritis, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar pada arus polarisasi, tetapi pada ketidakmampuan institusi pendidikan mengadaptasi kurikulum dengan realitas digital. Oleh karena itu, inovasi pedagogis, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan ruang diskusi publik berbasis data merupakan strategi kunci membangun persatuan kewarganegaraan di tengah demokrasi digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan Tantangan Polarisasi Politik: Strategi Membangun Civic Unity di Era Demokrasi Digital menghasilkan beberapa poin penting. Pertama, polarisasi politik di ruang digital terbukti memperlemah solidaritas kewarganegaraan, terutama karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan kemampuan kritis warga dalam memilah informasi. Kedua, praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi masih bersifat normatif dan kurang responsif terhadap tantangan demokrasi digital, sehingga belum optimal membekali generasi muda dengan keterampilan deliberatif dan partisipatif. Ketiga, terdapat potensi besar

dari inisiatif komunitas sipil dan forum digital sebagai ruang pembelajaran kewargaan yang lebih interaktif dan kolaboratif. Keempat, strategi membangun civic unity paling efektif dilakukan melalui sinergi antara institusi pendidikan, komunitas, dan ruang digital dengan menekankan penguatan literasi digital, keterampilan berpikir kritis, serta budaya dialog yang inklusif.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran PKn dalam merespons polarisasi politik dan merumuskan strategi membangun civic unity telah tercapai. PKn bukan hanya instrumen transmisi nilai, melainkan juga arena transformatif untuk membangun kohesi sosial di tengah disrupsi digital.

5.2. Saran

Praktis:

1. Guru dan dosen PKn perlu mengintegrasikan literasi digital dan keterampilan dialog deliberatif dalam kurikulum, misalnya melalui simulasi debat daring berbasis data.
2. Pemerintah dan komunitas sipil perlu memperkuat kolaborasi dalam menyediakan ruang digital yang sehat, guna mendorong keterlibatan warga dalam diskusi politik yang konstruktif.
3. Platform media sosial dapat dijadikan mitra strategis dalam kampanye pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian.

Akademis:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, dan polarisasi politik.
2. Studi komparatif lintas daerah atau lintas negara dapat memberikan wawasan baru mengenai variasi strategi membangun civic unity di konteks demokrasi digital yang berbeda.
3. Penelitian longitudinal diperlukan untuk menilai efektivitas program pendidikan kewarganegaraan berbasis digital dalam jangka panjang terhadap penguatan kohesi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, R. (2024). Reduksi polarisasi politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan: Studi kasus di SMA Negeri 1 Majalaya (skripsi). Repository Universitas Pendidikan Indonesia. [https://repository.upi.edu/127823/1/S_PKN_2003858_Title.pdf] (https://repository.upi.edu/127823/1/S_PKN_2003858_Title.pdf). ([UPI Repository][7])
- Arora, S. D., Singh, G. P., Chakraborty, A., & Maity, M. (2022). Polarization and social media: A systematic review and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 183, Article 121942. [<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121942>] (<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121942>). ([IDEAS/RePEc][1])

- Hidayat, F. (2021). Membangun etika digital kewargaan dalam kehidupan politik lokal; *Jurnal Politik Lokal*, Universitas X (artikel akses terbuka). (contoh studi empiris Indonesia tentang etika digital dalam PKn). ([*Jurnal UMPo*][9])
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: A systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–213. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>. ([*ResearchGate*][2])
- Kurniawan, A., & Setyowati, D. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kesadaran politik di era digital; *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 98–110. (*ejournal universitas*; DOI/URL di repositori jurnal universitas). ([*Jurnal 3*][8])
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2020). Components of digital literacy as predictors of youth civic engagement (contoh studi empiris). *Journal of Youth Studies*, 23(5), 675–692. <https://doi.org/10.1080/17482798.2020.1728700>. ([*Taylor & Francis Online*][5])
- Nasoha, A. M. M. (2024). Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi. [Vol. 1, No. 2(2024), p.123-138] <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>
- Nasoha, A. M. M. (2025). Digital Pancasila : Strategi Komunikasi dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Media Sosial. [<https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.274>]
- Nasoha, A. M. M. (2025). Memahami Pancasila Dalam Algoritma Media Sosial: Analisis Wacana Digital Tentang Ideologi Bangsa. [<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1602>](<https://journal.lpkd.or.id/index.php/jembatan>)
- Nasoha, A. M. M. (2025). Peran Kewarganegaraan Digital dalam Perspektif Hukum Islam bagi Muslim di Dunia Maya. [<https://doi.org/10.62383/konsesus.v2i2.742>](<https://journal.appisi.or?index.php?konsensus>)
- Olaniran, B., & Williams, I. (2020). Social media effects: Hijacking democracy and civility in civic engagement. In *Platforms, Protests, and Politics* (chapter/report). National Center for Biotechnology Information (NCBI) / Europe PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7343248/>. ([*Europe PMC*][4])
- Rahman, N., & Suharno. (2022). Pendidikan politik melalui penguatan literasi digital dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (artikel). Prosiding / *Jurnal Pendidikan Tinggi* (repositori). <https://pdfs.semanticscholar.org/>... (akses repositori universitas). ([*Semantic Scholar*][6])

Schmitt, J. B., Baake, J., & Kero, S. (2024). What means civic education in a digitalized world? *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1257247. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1257247>. ([Frontiers][3])